

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005

TENTANG

IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pialang Berjangka dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta kepastian hukum kepada para pelaku pasar, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan di bidang izin usaha Pialang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA**

Pasal 1

Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah menjadi Anggota Bursa Berjangka.
- (2) Setiap perusahaan Pialang Berjangka wajib mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perusahaannya dan dicantumkan dalam akte pendirian perusahaan.

Pasal 3

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Pialang Berjangka wajib diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan

dalam Formulir Nomor III.PRO.27.A s/d Nomor III.PRO.27.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik di kantor Pialang Berjangka serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.H.
- (3) Bappebti melakukan wawancara tentang akhlak, moral dan pengetahuan di bidang perdagangan berjangka terhadap Pihak yang mengendalikan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh izin usaha paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan.
- (5) Bappebti memberikan persetujuan izin usaha Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (6) Bappebti menyampaikan penolakan izin usaha yang diajukan oleh Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000,-- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka.
- (3) Pialang Berjangka wajib memiliki rekening terpisah (segregated account) pada bank penitipan yang disetujui Bappebti.

Pasal 6

- (1) Pialang Berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai salah seorang direktur dan 2 (dua) orang pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 7

- (1) Komisaris dan Direksi perusahaan Pialang Berjangka dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan berjangka lain yang dinyatakan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27 C.
- (2) Komisaris dan Direksi perusahaan Pialang Berjangka dilarang mempunyai saham pada perusahaan Pialang Berjangka lainnya yang dinyatakan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27 D.
- (3) Badan hukum perusahaan Pialang Berjangka dilarang mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya yang dinyatakan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27. E.

Pasal 8

- (1) Rencana perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka wajib dilaporkan kepada Bappebti;

- (2) Bappebti melakukan wawancara tentang akhlak, moral serta pengetahuan di bidang perdagangan berjangka terhadap pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO. 30 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.30.A. s.d. Nomor III.PRO.30.C.
- (4) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan pemegang saham dan pengurus Pialang Berjangka apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Rencana perubahan nama dan alamat Pialang Berjangka wajib dilaporkan kepada Bappebti.
- (2) Permohonan perubahan nama dan alamat Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO. 33 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.33.A. s.d. Nomor III.PRO.33.C.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atas permohonan perubahan, nama Pialang Berjangka dan alamat Pialang Berjangka setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 34. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Bappebti menyampaikan penolakan atas permohonan perubahan, nama Pialang Berjangka dan alamat Pialang Berjangka apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pialang Berjangka yang akan membuka kantor cabang wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Kantor Cabang kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO. 36 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO. 36.A. s.d. Nomor III.PRO.36.G.
- (2) Bappebti melakukan penelitian, pemeriksaan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) atas laporan pembukaan Kantor Cabang untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan untuk pembukaan Kantor Cabang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak wawancara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilakukan.
- (4) Persetujuan atas pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Pialang Berjangka diberikan setelah memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Penolakan atas pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Pialang Berjangka disampaikan apabila tidak memenuhi persyaratan dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO.38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 September 2005

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TITI HENDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Para eselon II di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

FORMULIR NOMOR: III.PRO.27

Nomor : ,200..
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Pialang Berjangka
.....
Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Pialang Berjangka.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
- 3. Jabatan Pemohon :
- 4. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
- 5. Nama Perusahaan Pialang Berjangka :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak : . . . -
- 5. Modal:
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
- 6. Alamat Perusahaan :
.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
- 7. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili :
- 8. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian perseroan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
2. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
3. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program pelatihan yang akan diadakan;
4. bukti setor Dana Kompensasi;
5. bukti pembukaan rekening terpisah;
6. surat kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dengan menggunakan Formulir Nomor IV. PRO.5 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/IV/2000;
7. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan perjanjian pemberian amanat;
8. sarana promosi dan publikasi;
9. copy tanda keanggotaan Bursa Berjangka;
10. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. copy izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
11. daftar nama dan data pemegang saham:
 - a. orang perseorangan meliputi:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - 3) 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6;
 - b. badan hukum meliputi:
 - 1) anggaran dasar; dan
 - 2) laporan keuangan terakhir;
12. daftar orang perseorangan yang mengendalikan Pialang Berjangka baik langsung maupun tidak langsung;
13. laporan keuangan yang diaudit Akuntan Publik paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan;
14. rekening koran 2 bulan terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan izin ke Bappebti ;
15. bukti modal disetor;
16. modal bersih disesuaikan (MBD);

17. surat pernyataan pemegang saham, komisaris dan direksi Pialang Berjangka yang menyatakan :
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.A
18. daftar pertanyaan mengenai integritas pemegang saham, komisaris atau direksi yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.A.1
19. surat pernyataan direksi bahwa Pialang Berjangka tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.B.
20. surat pernyataan direksi dan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.C;
21. surat pernyataan direksi dan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi atau komisaris dalam Pialang Berjangka yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.27.C.1;
22. surat pernyataan komisaris dan direksi tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.D
23. surat pernyataan direksi badan hukum yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.E
24. surat pernyataan direksi bahwa Pialang Berjangka bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka, pegawai tetap dan tidak tetap, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau Pihak yang bekerja pada perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka, dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.27.F;
25. Keterangan kelengkapan perusahaan Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 27.G

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
meterai

(.....)
(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.27.A

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan :
Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax :

selaku pemegang saham/komisaris/direktur*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

(.....)
(nama jelas)

*) Pilih salah satu

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?
ya tidak
7. masuk daftar hitam perbankan?
ya tidak
8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?
ya tidak
9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ?
ya tidak
10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka
(khusus bagi direksi)?
ya tidak

.....
(Tempat dan tanggal)
Pemohon/Direksi/Komisaris/Pengendali/Pemegang Saham,

meterai

.....
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR: III.PRO.27.B

**SURAT PERNYATAAN
DIREKSI TENTANG PENGENDALI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur utama

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)
2.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT..... tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:

- a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
- b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- c. tidak memiliki ahlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200..

Direksi PT.....,

(nama jelas) (tanda tangan)

materai

1.(.....) (.....)

2.(.....) (.....)

FORMULIR NOMOR: III.PRO.27.C

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
- Nomor identitas
(KTP/Paspor)

:
- NPWP

:
- Jabatan

:
- Alamat lengkap

:
- (Nama Jalan & Nomor)
-
- (Kota & Kode Pos)
- Nomor telp/fax

:
2. Nama

:
- Nomor identitas
(KTP/Paspor)

:
- NPWP

:
- Jabatan

:
- Alamat lengkap

:
- (Nama Jalan & Nomor)
-
- (Kota & Kode Pos)
- Nomor telp/fax

:

selaku komisaris/direktur/calon direktur/calon komisaris *) PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap sebagai komisaris/direksi pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

(.....)
(nama jelas)

*) Pilih Salah Satu

FORMULIR NOMOR: III.PRO.27.C.1

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

Jabatan : Komisaris/Direktur *)

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai/mempunyai*)
hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota komisaris/direksi *) lainnya dalam
perusahaan..., yaitu Sdr...

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,200..

meterai

(.....)
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR: III.PRO.27.D

**SURAT PERNYATAAN
KOMISARIS DAN DIREKSI TIDAK MEMPUNYAI SAHAM
DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Komisaris

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)
2.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur Utama

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Komisaris dan Direksi PT..... tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200..

(nama jelas) (tanda tangan)

1. Komisaris

(.....) (.....)

2. Direktur Utama meterai

(.....) (.....)

FORMULIR NOMOR: III.PRO.27.E

**SURAT PERNYATAAN
DIREKSI BAHWA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA
TIDAK MEMPUNYAI SAHAM
DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur Utama

Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di
.... dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
PT..... tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,200..

(nama jelas) (tanda tangan)

1. Komisaris

(.....) (.....)

2. Direktur Utama meterai

(.....) (.....)

FORMULIR NOMOR III.PRO.27.F

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur utama

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)
2.

Nama :

Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direktur

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT berkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Direksi Perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka, Pegawai tetap dan/atau tidak tetap yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200..

Direktur Utama,

meterai

(nama jelas) (tanda tangan)

1.(.....) (.....)

2.(.....) (.....)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.27.G

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

I. NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :

II. Daftar nama orang perseorangan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

III. Daftar perusahaan pemegang saham

No	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah (%)

IV. Daftar prasarana dan sarana perusahaan

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1.	Struktur organisasi, personalia dan Wakil Pialang Berjangka		
2.	Sistem pengawasan intern		
3.	Sistem pelatihan		
4.	Pelayanan pengaduan		
5.	Ruang dan perlengkapan kantor		
6.	Media Promosi (<i>leaflet</i> , brosur,dll.)		
7.	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
8.	Ruang operasional (<i>dealing room</i>)		
9.	Komputer <i>on-line</i> dengan Bursa dan/atau Kliring Berjangka		
10.	Alat rekam dan pencatat waktu		

.....,200..

meterai

(.....)
(Direktur Utama)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.27.H

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRASARANA DAN SARANA
PIALANG BERJANGKA**

Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun..... di..... yang
bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
3.

Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Perusahaan untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka dengan keterangan kelengkapan perusahaan seperti tercantum dalam Formulir Nomor III.PRO.27.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa,

Yang diperiksa :

.....

Cap Perusahaan

(.....)

Jabatan

1.
2.
3.

FORMULIR NOMOR:III.PRO.28

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR:

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
SEBAGAI PIALANG BERJANGKA**

KEPADA PT

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari PT.....
Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Pialang Berjangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA KEPADA PT**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Pialang Berjangka kepada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Izin Usaha ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

FORMULIR NOMOR : III.PRO.29

Nomor : Jakarta,200....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Kepada Yth.
Usaha Pialang Berjangka
..... di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti permohonan
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal..

FORMULIR NOMOR: IIL.PRO.30

Nomor : ,200..
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
Pemegang saham/pengurus*) Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan pemegang saham/pengurus*) PT. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Nomor identitas :
- (KTP/Paspor)
- 3. Jabatan Pemohon :
- 4. Alamat Pemohon :
-
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
- 5. Nama Perusahaan Pialang Berjangka :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak : . . . -
- 5. Modal:
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
- 6. Alamat Perusahaan :
-
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
- 7. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili :
- 8. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta perubahan perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;
2. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, uraian tugas, proyeksi keuangan, *standard operational procedure* (SOP) fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program latihan yang akan diadakan;
4. surat pernyataan kesediaan memberikan surat kuasa pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bappebti;
5. sarana promosi dan publikasi;
6. daftar nama dan data pemegang saham/anggota komisaris dan direksi yang baru:
 - a. pemegang saham orang perseorangan meliputi:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3) empat lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6;
 - b. pemegang saham badan hukum meliputi:
 - 1) anggaran dasar; dan
 - 2) laporan keuangan terakhir;
 - c. Anggota komisaris dan direksi meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - 3) copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 4) empat lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
7. daftar orang perseorangan yang mengendalikan Pialang Berjangka baik langsung maupun tidak langsung;
8. surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru Pialang Berjangka yang menyatakan :
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris dan direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.30.A
9. surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru, yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada Pialang Berjangka lain dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.30.B;

10. surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris atau direksi dalam Pialang Berjangka yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.30.C;
11. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Formulir Nomor III.PRO.30.C.1.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

(.....)
(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.30.A

**SURAT PERNYATAAN
BERMORAL BAIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku pemegang saham/komisaris/direktur*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

(.....)
(nama jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR : III.PRO.30.B

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax :

2. Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax :

selaku direktur/komisaris/calon direktur/calon komisaris*) PTyang beralamat di
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap
sebagai direksi/komisaris pada Pialang Berjangka lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,200...

meterai

.....
(nama jelas)

*) Pilih Salah Satu

Formulir Nomor : III.PRO.30.C

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

Jabatan : Komisaris/Direktur

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai/mempunyai*)
hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris/direksi*) lainnya dalam perusahaan,
yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,200..

meterai

(.....)
(nama jelas)

*) Pilih Salah Satu

diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?

ya

tidak

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?

ya

tidak

7. masuk daftar hitam perbankan?

ya

tidak

8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?

ya

tidak

9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ?

ya

tidak

10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi)?

ya

tidak

.....

(Tempat dan tanggal)

Pemohon/Direksi/Komisaris/Pengendali/Pemegang Saham,

meterai

.....

(nama jelas)

FORMULIR NOMOR:III.PRO.31

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM/PENGURUS

PIALANG BERJANGKA

PADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat permohonan perubahan pemegang saham/pengurus Pialang Berjangka pada PT..... Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan pemegang saham/pengurus Pialang Berjangka pada PT.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PIALANG BERJANGKA PADA PT.**

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan pemegang saham/pengurus Pialang Berjangka pada PT dengan alamat kantor pusat di

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai fungsinya dan bekerja pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

FORMULIR NOMOR : III.PRO.32

Nomor	:		Jakarta,	200....
Lampiran	:	---		
Perihal	:	Penolakan Permohonan Perubahan Pemegang Saham/Pengurus	Kepada Yth. di -	

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Depdag;
- 3. Inspektur Jenderal Depdag;
- 4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
- 5. Peringgal.

FORMULIR NOMOR: III.PRO.33

Nomor : ,200..

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Kepada Yth.
Nama/Alamat *) Kepala Badan Pengawas
PT..... Perdagangan Berjangka Komoditi
..... di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Nama/Alamat*) PT.
..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1.	Nama Pemohon	:
2.	Nomor identitas (KTP/Paspor)	:
3.	Jabatan Pemohon	:
4.	Alamat Pemohon	: (Nama jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
5.	Nama Perusahaan Pialang Berjangka (lama)	:
	Nama Perusahaan Pialang Berjangka (baru)	:
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: - (lama)
	Nomor Pokok Wajib Pajak	: - (baru)
7.	Modal:		
	a. Modal Dasar	:
	b. Modal Disetor	:
8.	Alamat Perusahaan (lama)	: (Nama jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
	Alamat Perusahaan (baru)	: (Nama jalan & Nomor) - (Kota & Kode Pos)
9.	Nomor Telepon dan Faksimili (lama)	:
	Nomor Telepon dan Faksimili (baru)	:
10.	Pegawai Penghubung	:

Untuk perubahan nama, melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta perubahan perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;
2. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, uraian tugas, proyeksi keuangan, *standard operational procedure* (SOP) fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan program latihan yang akan diadakan;
4. surat pernyataan kesediaan memberikan surat kuasa pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bappebti;
5. sarana promosi dan publikasi;
6. daftar nama dan data pemegang saham atau komisaris dan direksi yang baru:
 - a. pemegang saham orang perseorangan meliputi:
 - 1) riwayat hidup;
 - 2) copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3) empat lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6;
 - b. pemegang saham badan hukum meliputi:
 - 1) anggaran dasar; dan
 - 2) laporan keuangan terakhir;
 - c. komisaris dan direksi meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - 3) copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 4) empat lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6.
7. daftar orang perseorangan yang mengendalikan Pialang Berjangka baik langsung maupun tidak langsung;
8. surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru Pialang Berjangka yang menyatakan :
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.33.A
9. surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru, yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada Pialang Berjangka lain dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.33.B;

10. surat pernyataan komisaris dan direksi yang baru bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris atau direksi dalam Pialang Berjangka yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.33.C;
11. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Formulir Nomor III.PRO.33.C.1.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*) Pilih Salah Satu

Pemohon

meterai

(.....)
(Nama Jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.33.A

**SURAT PERNYATAAN
BERMORAL BAIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp/fax :

selaku pemegang saham/komisaris/direktur*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

(.....)
(nama jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR : III.PRO.33.B

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan :
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan sebagai komisaris/direksi*) pada Pialang Berjangka lain.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

.....
(nama jelas)

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR : III.PRO.33.C

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

Jabatan : Komisaris/Direktur*)

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris/direksi lainnya dalam perusahaan, yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200..

meterai

(.....)
(nama jelas)

*) Pilih Salah Satu

.....
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR:III.PRO.34

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA/ALAMAT

PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat permohonan perubahan nama/alamat PT..... Nomor
..... tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu
dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan perubahan nama/alamat
PT.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Perdagangan Berjangka Komoditi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor
56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN
PERUBAHAN NAMA/ALAMAT*) PT.**

Pasal 1

Memberikan persetujuan perubahan nama/alamat*) PT dengan alamat kantor pusat di
.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai
fungsinya dan bekerja pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

.....

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

FORMULIR NOMOR : IIL.PRO.35

Nomor : Jakarta,200....
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
Perubahan Nama/Alamat
..... di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI**

.....

Tembusan:

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Depdag;
- 3. Inspektur Jenderal Depdag;
- 4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
- 5. Peringgal.

FORMULIR NOMOR: III.PRO.36

Nomor :200...

Lampiran :

Perihal : Laporan Pembukaan Kantor
Cabang PT.....
.....
Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
di -
Jakarta

Dengan ini kami melaporkan bahwa kami akan membuka Kantor Cabang Kategori A/B *) di..... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pelapor :

2. Nomor identitas :

(KTP/Paspor)

3. Jabatan Pelapor :

4. Alamat Pelapor :

.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

5. Nama Perusahaan Pialang Berjangka :

4. Nomor Pokok Wajib Pajak : . . . -

5. Modal:

a. Saldo Modal Akhir :

b. Penambahan Modal :

6. Alamat Perusahaan :

.....
(Nama jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)

7. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili :

8. Pegawai Penghubung :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- 2. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, dan progam pelatihan yang akan diadakan;
- 3. khusus Kantor Cabang Kategori A :
 - a. bukti pembukaan rekening terpisah;
 - b. surat kuasa kepada Bappebti untuk melakukan pemeriksaan rekening terpisah sewaktu-waktu dengan menggunakan Formulir IV. PRO.5

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/IV/2000;

- c. dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan perjanjian pemberian amanat.
4. daftar nama dan data pegawai yang memiliki izin Wakil Pialang Berjangka yang dilengkapi dengan :
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
 - c. copy izin Wakil Pialang Berjangka;
 - d. copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor; dan
 - e. 4 (empat) lembar pas photo terbaru ukuran 4 x 6.
5. laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal yang diaudit Akuntan Publik;
6. daftar pertanyaan mengenai integritas direksi Kantor Cabang yang dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.36.A.
7. surat pernyataan direksi bahwa Kantor Cabang tidak dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:
 - a. pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perdagangan berjangka;
 - b. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
 - c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.36.B.
8. surat pernyataan direksi Kantor Cabang yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada Pialang Berjangka lain dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.36.C;
9. surat pernyataan direksi Kantor Cabang bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi Pialang Berjangka yang bersangkutan dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.36.D.;
10. surat pernyataan direksi tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.36.E;
11. Keterangan kelengkapan Kantor Cabang Pialang Berjangka dibuat dengan menggunakan Formulir Nomor III. PRO. 36.F.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor
meterai

(.....)
(Nama Jelas)

6. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik?
ya tidak
7. masuk daftar hitam perbankan?
ya tidak
8. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak?
ya tidak
9. memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ?
ya tidak
10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka
(khusus bagi direksi)?
ya tidak

.....,

Pelapor,

meterai

.....

(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.36.B

**SURAT PERNYATAAN
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan : Direksi
Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax :

selaku Kepala dari Kantor Cabang PT dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

(.....)
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.36.C

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor identitas :
(KTP/Paspor)
NPWP :
Jabatan : Direksi
Alamat lengkap :
(Nama Jalan & Nomor)
..... -
(Kota & Kode Pos)
Nomor telp/fax :

selaku Kepala Kantor Cabang PTyang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap sebagai komisaris/ direksi pada perusahaan lain.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200...

meterai

(.....)
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.36.D.

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

Jabatan : Direksi

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan komisaris/ direksi lainnya dalam perusahaan, yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200..

meterai

(.....)
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.36.E

**SURAT PERNYATAAN
DIREKSI TIDAK MEMPUNYAI SAHAM
DI PERUSAHAAN BERJANGKA LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas :
(KTP/Paspor)

NPWP :

Jabatan : Direksi

Alamat lengkap :

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Direksi PT..... tidak mempunyai saham pada perusahaan berjangka lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,200..

Pelapor,

meterai

(.....)
(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.36.F.

KETERANGAN KELENGKAPAN PERUSAHAAN

I. NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :

II. Daftar prasarana dan sarana perusahaan

NO.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	URAIAN	KETERANGAN
1.	Struktur organisasi, personalia dan Wakil Pialang Berjangka		
2.	Sistem pengawasan intern		
3.	Sistem pelatihan		
4.	Pelayanan pengaduan		
5.	Ruang dan perlengkapan kantor		
6.	Alat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi		
7.	Ruang operasional (<i>dealing room</i>) khusus Kategori A		
8.	Komputer <i>on-line</i> dengan Bursa dan/atau Kliring Berjangka khusus Kategori A		
9.	Alat rekam dan pencatat waktu khusus Kategori A		

.....,200..

meterai

(.....)
(Kepala Kantor Cabang)

FORMULIR NOMOR : III.PRO.36.G.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRASARANA DAN SARANA
KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA**

Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun..... di..... yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
2. Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:
3. Nama

:
- NIP

:
- Jabatan

:

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor Tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kantor Cabang PT. untuk melakukan kegiatan sebagai Kantor Cabang Pialang Berjangka dengan keterangan kelengkapan perusahaan seperti tercantum dalam Formulir Nomor III.PRO.36.F.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa,

Yang diperiksa :

.....

Cap Kantor Cabang

(.....)

Kepala Kantor Cabang

1.

2.

3.....

FORMULIR NOMOR:III.PRO.37

Lampiran : ---

Perihal : Penetapan Kantor Cabang Pialang
Berjangka Kategori ... untuk Kantor
Cabang PT.
yang beralamat di

Kepada Yth.
Direktur Utama

.....
.....
.....
di
.....

Menunjuk surat Saudara No..... tanggalperihal Laporan
Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka dan Berita Acara hasil
pemeriksaan prasarana dan sarana fisik yang dilakukan Tim Pemeriksa
Bappebti pada tanggal, bersama ini kami sampaikan bahwa
persyaratan permodalan, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta
prasarana dan sarana fisik yang dimiliki untuk pembukaan Kantor Cabang
Pialang Berjangka PT. di, telah dipenuhi.

Dengan telah dipenuhinya ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
dan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004
tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka serta
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin
Usaha Pialang Berjangka, maka Kantor Cabang Pialang Berjangka PT.
..... dengan alamat di, terhitung mulai
tanggal penetapan ini dapat beroperasi sebagai Kantor Cabang Pialang
Berjangka Kategori

Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

TITI HENDRAWATI

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

FORMULIR NOMOR : III.PRO.38

Nomor : Jakarta,200....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Laporan Kepada Yth.
Pembukaan Kantor Cabang
Pialang Berjangka di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti laporan
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa laporan Saudara ditolak karena tidak
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.